



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Jalan Siliwangi No. 9 Purwakarta 41111
Telp (0264) 8304884, 8227888; Faks (0264) 8225765; situs: djkn.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-12/KNL.0804/2025

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL
Purwakarta Periode Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2025

Sehubungan dengan nota dinas Bapak nomor ND-1793/WKN.08/2024 tanggal 23 Desember 2024 hal Permintaan Laporan Layanan Informasi Publik PPID DJKN Tahun 2024 dan Pembuatan Surat Keputusan Pembentukan Petugas Layanan Informasi Tahun 2025, serta memperhatikan nota dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat nomor ND-1965/KN.7/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Pengelolaan Layanan Informasi Publik oleh PPID Tingkat II dan III, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta Periode Tahun 2024.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta berkomitmen mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam keseharian agar terwujud pelayanan yang bersih, akuntabel, inovatif dan konsisten.

Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

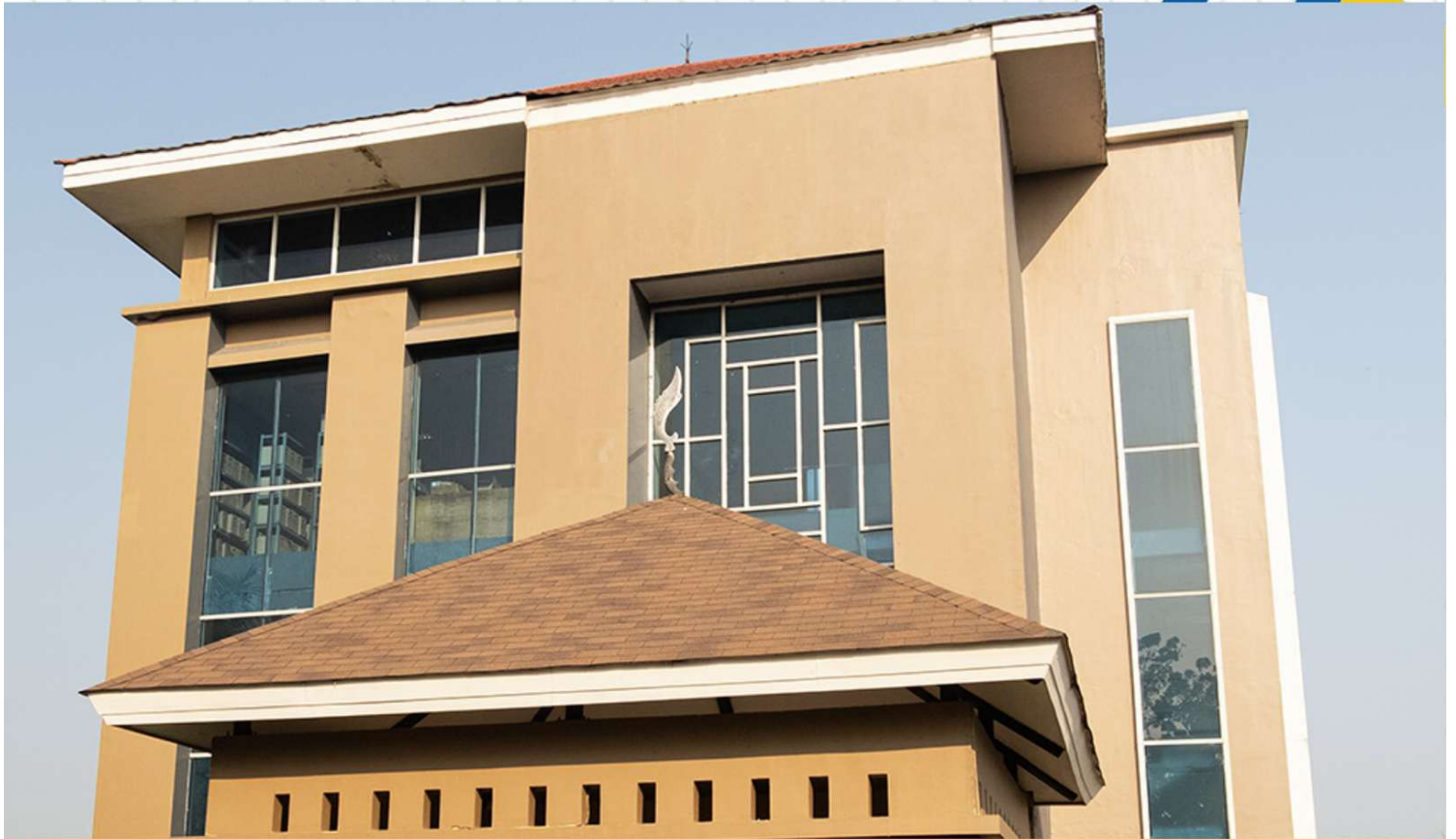


Ditandatangani secara elektronik
Harmani Sri Mumpuni





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PURWAKARTA**

TAHUN 2024





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Jalan Siliwangi No. 9 Purwakarta 41111
Telp (0264) 8304884, 8227888; Faks (0264) 8225765; situs: djkn.kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL PURWAKARTA
TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Secara struktur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta berada pada level PPID Tingkat III yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan KPKNL Purwakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 110/KMK.01/2022 adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/ atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II dalam hal ini adalah Kepala KPKNL Purwakarta.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Purwakarta memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL Purwakarta dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KPKNL Purwakarta memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Kerja dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Purwakarta juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/KMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik memiliki jenjang sebagai berikut:

1. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas DJKN
2. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III : KPKNL

Guna mendukung layanan informasi melalui KPKNL Purwakarta terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta melalui:

1. Surat tertulis/cetak;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat kpknl.purwakarta@kemenkeu.go.id;
3. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik sesuai ketentuan Surat Perintah Kepala KPKNL Purwakarta Nomor PRIN-3/KNL.0804/2024 tanggal 16 Januari 2024 selaku perangkat PPID Tingkat III adalah:

1. Nama : Peter Sony
NIP : 197710221997031002
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi

2. Nama : Siti Jenab
NIP : 197605101997032001
Pangkat/Gol : Pengatur/ III.c
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi

3. Nama : Thobby Maulana Pasha
NIP : 198412222006021001
Pangkat/Gol : Pengatur/ III.c
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi

4. Nama : Arifatul Faizah
NIP : 199605242018012004
Pangkat/Gol : Pengatur Tk I/ II.d
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi

SDM tersebut bertugas untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik kepada KPKNL Purwakarta pada tahun 2024 adalah **nihil/tidak ada permintaan dan tidak ada sengketa informasi publik.**

E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2024 tercatat tidak ada permintaan informasi publik. Namun sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap sesuai prosedur Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja** dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengingat belum adanya permohonan informasi publik ke KPKNL Purwakarta di tahun 2024, maka kendala eksternal dan internal belum dapat dideskripsikan dalam laporan ini.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwakarta melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta.

Purwakarta, 2 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Harmani Sri Mumpuni



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<i>NIHIL</i>																									

Purwakarta, 2 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Harmani Sri Mumpuni



